

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Adi, Rianto, 2004, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Granit, Jakarta;
- Atika Hayati, Kemala, 2015, *Hak Suara Kreditor Separatis dalam Proses Pengajuan Upaya Perdamaian Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan;
- Bahsan, M, 2020, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta;
- B. G. Tumbuan, Fred, 2001, *Ciri-ciri Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sebagaimana Dimaksud dalam Undang-Undang tentang Kepailitan*, dalam Rudhy A. Lontoh, Denny Kailimang, Benny Ponto (ed), *Penyelesaian Utang Piutang, Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Alumni, Bandung;
- Elijana, 1998, *Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Kepailitan*, Makalah Dalam Seminar Tentang Undang-Undang Kepailitan di Jakarta, Juni;
- Fred, BG Tumbuan dalam Rudy A Lontoh & et. al (editor), 2001, *Hukum Kepailitan: Penyelesaian Utang Piutang melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Alumni, Bandung.;
- Fuady, Munir, 2005, *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek*, Citra Aditya Bakti, Bandung;

Fuady, Munir, 2014, *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek*, Citra Aditya Bakti, Bandung;

Hartono, Darminto, 2009, *Economic Analysis of Law Atas Putusan PKPU Tetap*, Lembaga Studi Hukum dan Ekonomi Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta;

Jono, 2010, *Hukum Kepailitan*, Sinar Grafika, Jakarta;

Kadir Muhammad, Abdul, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung Citra Aditya Bakti, Banjarmasin;

Mahmud Marzuki, Peter, 2011, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media, Jakarta;

Muljadi, Kartini, 2001, *Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Serta Dampak Hukumnya*, dalam Rudhy A. Lontoh, Denny Kailimang, Benny Ponto (ed), Penyelesaian Utang Piutang, Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Alumni, Bandung;

Nasution, S, 2011, *Metode Research (Penelitian Ilmiah) usulan Tesis, Desain Penelitian, Hipotesis, Validitas, Sampling, Populasi, Observasi, Wawancara, Angket*, Cetakan ke-4, PT. Bumi Aksara, Jakarta;

Pramono, Nindyo dan Sularto, 2017, *Hukum Kepailitan dan Keadilan Pancasila Kajian Filsafat Hukum atas Kepailitan Badan Hukum Perseroan Terbatas di Indonesia*, ANDI, Yogyakarta;

Remy Sjahdeini, Sutan, 2008, *Hukum Kepailitan Memahami Undang- Undang No. 37 Tahun 2008 tentang Kepailitan*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta;

- Remy Sjahdeini, Sutan, 2016, *Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan : Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Kencana, Jakarta;
- Subhan, M. Hadi, 2009, *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik di peradilan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta;
- Sunaryati Hartono, C.F.G, 2006, *Penelitian Hukum di Indonesia pada Akhir Abad ke-20*, cetakan ke-2, Penerbit Alumni, Bandung;
- SW Sumardjono, Maria, 2019, *Metodologi Penelitian Ilmu Hukum*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

### Internet

- <https://smartlegal.id/badan-usaha/2020/06/02/kenali-3-jenis-Kreditor-dalam-kepailitan/>, *Kenali 3 Jenis Kreditor Dalam Kepailitan*, Jakarta: Smartlegal.id, 2020, diakses pada tanggal 13 Desember 2022.
- <https://doktorhukum.com/jenis-Kreditor-dalam-perkara-kepailitan/>, *Jenis Kreditor dalam Perkara Kepailitan*, Jakarta: Redaksi Legal Keluarga, 2019, diakses pada tanggal 13 Desember 2022.

### Jurnal dan Karya Ilmiah

- Adinata, I Made Teguh dan I Made Dedy Priyanto, “Perlindungan Hukum Kreditor Separatis Terhadap Hak Jaminan Yang Diagunkan Oleh Debitor Pailit”, *Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum*, Vol. 7, No. 10, November 2019;

- Akyas, Mohamad, “Eksekusi Lelang Oleh Kreditor Separatis Pada Masa Perdamaian Dalam PKPU Dalam Kajian Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang”, *Acta Djurnal: Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, Vol. 5, No. 2, Juni 2022;
- Alim Wijaya, Aria dkk. “Hak Eksekusi Kreditor Separatis Terhadap Benda Agunan Dalam Kepailitan”, *Pactum Law Journal*, Vol. 2, No. 03, 2019;
- Atmajaya, Hendra, 2018, *Perlindungan Hukum Terhadap Kreditor Dalam Kepailitan (Studi Putusan No.03/Pdt.Sus-PKPU/2014/PN Niaga.Mks)*, Skripsi, UIN, Makassar;
- Heddy Kandoua, Dhaniswara K Harjonob dan Aartje Tehupeiorcy, “Jaminan Fidusia Sebagai Jaminan Kebendaan Yang Memberi Hak Mendahulu Dalam Perolehan Pelunasan Utang, *Jurnal Hukum: Hukum Untuk Mengatur Dan Melindungi Masyarakat*”, Vol. 7, Februari 2021;
- Puspitasari, Metalia, 2014, *Eksekusi Objek Jaminan Fidusia atas Debitor yang Dinyatakan Pailit*, Skripsi, UNAIR, Surabaya;
- Rahmani, Imanuel, “Perlindungan Hukum Kepada Pembeli Dalam Kepailitan Pengembang (Developer) Rumah Susun” *Jurnal Hukum: Bisnis Bonum Commune* Vol. 1, No. 1, Agustus 2018;
- Redjeki Slamet, Sri, “Perlindungan Hukum Dan Kedudukan Kreditor Separatis Dalam Hal Terjadi Kepailitan Terhadap Debitor”, *Forum Ilmiah*, Vol. 13, No. 1, Januari 2016;

- Rifai, Achmad dan Sapto Wahyono, “Kekuatan Hukum Pemegang Hak Tanggungan Atas Pengikatan Kembali Objek Jaminan Dengan Hak Gadai Tanah” Jurnal YUSTITIA, Vol. 22, No. 1, Mei 2021;
- Sari Yosefin, Kartika “Akibat Hukum Pembatalan Putusan Homologasi Bagi Debitor Ditinjau Dari Undang-Undang Kepailitan Di Indonesia” Vol. 31, No. 5, Oktober 2023;
- Setiawan, Danang, 2018, *Pembayaran Piutang Kreditor Dalam Hukum Kepailitan (Studi Beberapa Putusan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi)*, Skripsi, UII, Yogyakarta;
- Sitorus, Verry, 2019, *Hak Kreditor Separatis Yang Kalah Dalam Pemungutan Suara Pada Proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Tesis, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Kampus Jakarta, 2019;
- W.A Pasaribu, Ester, 2018, *Tinjauan Yuridis Peran dan Efektivitas PKPU dalam Mencegah Terjadinya Kepailitan menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Skripsi, UHN, Medan;
- Wijayanta, Tata, “Asas Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan Dalam Kaitannya Dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga” Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 14, No. 2, Mei 2014.

### **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2005 Tentang Penghitungan Hak Suara Kreditor.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan;

### **Putusan**

Putusan Nomor 188/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst;

Putusan Nomor 1433 K/Pdt.Sus-Pailit/2020;

Putusan Nomor 411/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst;

Putusan Nomor 457 K/Pdt.Sus-Pailit/2022.